

STRATEGI NEGOSIASI ANTARFRAKSI PRO DAN KONTRA PEMERINTAH DALAM PENYESUAIAN KEBIJAKAN RUU PEMILU TAHUN 2017

Negotiation Strategies between Pro- and Anti-Government Parliamentary Factions in Adjusting the 2017 Election Bill

Edik Prayitno

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Bung Karno

Abstract: *Negotiation is central to public-policy formulation when political actors hold different preferences and interests. This study examines negotiation strategies among parliamentary factions supporting and opposing the government during the adjustment of Indonesia's 2017 Election Bill. It uses a qualitative case-study approach and interprets the policy discussion through dialectical-relational and functional group-communication perspectives. The analysis focuses on the electoral system, parliamentary threshold, presidential threshold, district magnitude, and vote-conversion method. The findings indicate that negotiation proceeded through problem identification, clarification of factional interests, intensive communication, lobbying, exchange of information, comparison of alternatives, and efforts to identify shared positions. Agreement was facilitated when participants emphasized common electoral objectives and treated differences as issues to be managed through dialogue. The study concludes that policy negotiation requires structured information, active inter-faction communication, and a problem-solving orientation that preserves fairness among electoral actors.*

Keywords: Negotiation strategy; Political communication; Parliamentary factions; Election Bill; Public policy

Abstrak: Negosiasi berperan penting dalam perumusan kebijakan publik ketika para aktor politik memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda. Penelitian ini mengkaji strategi negosiasi antarfraksi yang pro dan kontra terhadap pemerintah dalam penyesuaian RUU Pemilu Tahun 2017. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus serta membaca pembahasan kebijakan melalui perspektif dialektika hubungan dan komunikasi kelompok fungsional. Analisis difokuskan pada sistem pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, besaran daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi berlangsung melalui identifikasi masalah, penjelasan kepentingan fraksi, komunikasi intensif, lobi, pertukaran informasi, perbandingan alternatif, dan pencarian titik temu. Kesepakatan lebih mungkin dicapai ketika peserta menekankan tujuan kepemiluan yang sama dan mengelola perbedaan melalui dialog. Penelitian menyimpulkan bahwa negosiasi kebijakan memerlukan informasi terstruktur, komunikasi aktif antarfraksi, dan orientasi pemecahan masalah yang menjaga keadilan bagi para aktor pemilu.

Kata Kunci: Strategi negosiasi; Komunikasi politik; Fraksi DPR; RUU Pemilu; Kebijakan publik

1. Pendahuluan

Negosiasi merupakan proses penyesuaian antara dua pihak atau lebih yang membawa tujuan dan kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan. Dalam perumusan kebijakan publik, negosiasi diperlukan karena keputusan harus mengakomodasi kepentingan politik, kebutuhan penyelenggaraan, dan konsekuensi hukum. Proses tersebut menuntut kemampuan mengelola perbedaan tanpa menjadikan emosi atau kepentingan sepihak sebagai dasar keputusan.

Pemilihan umum menjadi arena kompetisi politik sekaligus mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat. Pemilu memindahkan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan ke dalam lembaga negara agar dapat dibicarakan serta diputuskan secara beradab. Karena aturan pemilu memengaruhi perilaku pemilih, partai, calon legislatif, dan calon pejabat eksekutif, penyusunannya selalu mengandung konsekuensi politik bagi aktor yang terlibat.

Pembahasan RUU Pemilu Tahun 2017 mempertemukan fraksi yang mendukung dan menolak posisi pemerintah. Perbedaan terutama berkaitan dengan desain sistem pemilu, ambang batas, alokasi kursi, dan metode konversi suara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi negosiasi yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, memahami kepentingan fraksi, membangun alternatif, dan mencari titik temu dalam penyesuaian kebijakan.

2. Kerangka Teoretis

2.1. Dialektika Hubungan

Teori dialektika hubungan Leslie A. Baxter memandang hubungan sebagai ruang pengelolaan kekuatan yang saling berlawanan. Makna hubungan dibentuk melalui dialog di antara banyak suara, sedangkan dialektika merujuk pada ketegangan yang hadir ketika pilihan atau kepentingan sama-sama kuat. Dalam pembahasan RUU Pemilu, perbedaan posisi fraksi dipahami sebagai ketegangan yang perlu dikelola, bukan dihapus secara sepihak.

2.2. Komunikasi Kelompok Fungsional

Pendekatan fungsional memandang komunikasi sebagai instrumen pengambilan keputusan kelompok. Komunikasi membantu anggota menyampaikan informasi, mengenali kekeliruan pemikiran, membandingkan alternatif, dan melakukan persuasi. Dewey merumuskan tahapan pemecahan masalah berupa pernyataan kesulitan, penentuan masalah, analisis masalah, saran penyelesaian, perbandingan alternatif, serta pelaksanaan solusi terbaik.

2.3. Strategi dan Negosiasi

Strategi mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan rangkaian tindakan ke dalam rencana yang utuh (Quinn, 2000). Dalam komunikasi, strategi menghubungkan perencanaan dan pengelolaan tindakan agar tujuan dapat dicapai sesuai situasi. Jackman menjelaskan negosiasi sebagai proses antara dua pihak atau lebih yang semula memiliki pemikiran berbeda hingga mencapai kesepakatan melalui tindakan saling memberi dan menerima.

Pilihan strategi negosiasi dapat berbentuk win-win, win-lose, lose-lose, atau lose-win. Perumusan kebijakan idealnya diarahkan pada strategi integratif atau win-win karena keputusan harus dapat diterima dan dilaksanakan oleh banyak pihak. Lobi melengkapi negosiasi dengan membangun sudut pandang positif, membuka saluran komunikasi, dan mempersiapkan dukungan terhadap alternatif kebijakan.

2.4. Kebijakan Publik dan Fraksi

Kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (Dye dalam Subarsono, 2005). Dalam DPR, fraksi mengoordinasikan anggota yang memiliki pandangan politik sejalan dan membantu mereka menjalankan tugas secara efektif. Karena setiap fraksi membawa kepentingan serta kalkulasi politik, pembahasan kebijakan memerlukan mekanisme pertukaran informasi dan pencarian keseimbangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses negosiasi sebagai fenomena yang berlangsung dalam konteks nyata dan melibatkan banyak kepentingan. Studi kasus mempertahankan karakteristik holistik suatu peristiwa serta menggunakan berbagai sumber bukti untuk membaca hubungan antara proses komunikasi, posisi fraksi, dan hasil pembahasan.

Unit analisis adalah proses negosiasi dalam penyesuaian RUU Pemilu Tahun 2017. Data dalam naskah sumber dibaca melalui pengelompokan masalah, kebutuhan aktor, strategi komunikasi, alternatif kebijakan, dan bentuk pencarian kesepakatan. Sumber tidak memerinci jumlah informan, waktu wawancara, atau distribusi posisi fraksi; oleh karena itu, artikel tidak menyajikan generalisasi kuantitatif maupun klaim mengenai sikap individual anggota Pansus.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Isu Krusial dalam RUU Pemilu

Kodifikasi aturan pemilu diperlukan karena pengaturan yang tersebar dalam beberapa undang-undang menimbulkan kontradiksi, duplikasi, perbedaan standar, dan ketidakkonsistenan. Pembahasan RUU Pemilu berupaya menyatukan pengaturan sekaligus mempertimbangkan konsekuensi desain sistem terhadap pemilih, partai, calon legislatif, dan calon pejabat eksekutif.

Tabel 1: Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pemilu Tahun 2017

Isu	Ruang Perdebatan Kebijakan
Sistem pemilu	Pilihan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup serta pencantuman calon.
Parliamentary threshold	Ambang batas perolehan suara partai untuk memperoleh kursi di parlemen.
Presidential threshold	Ambang batas pencalonan presiden dan konsekuensinya bagi koalisi partai.
Besaran daerah pemilihan	Alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan atau district magnitude.
Konversi suara	Metode mengubah perolehan suara menjadi distribusi kursi.

Sumber: pengelompokan substansi naskah sumber.

4.2. Tahapan Strategi Negosiasi

Tahap pertama adalah identifikasi masalah melalui kajian dan riset yang berorientasi pada tujuan perubahan undang-undang. Identifikasi yang jelas mencegah perdebatan hanya berpusat pada posisi politik dan membantu peserta memahami konsekuensi setiap alternatif. Informasi mengenai prioritas pihak lain juga membuka peluang pertukaran yang lebih produktif.

Tahap kedua adalah pemetaan kebutuhan dan kepentingan fraksi. Komunikasi intensif antarfaksi, pertemuan lobi, dan negosiasi formal digunakan untuk menjelaskan kepentingan masing-masing pihak. Tujuan mendasarnya adalah

memastikan partai dapat menjadi peserta pemilu, memperoleh perlakuan adil, dan memiliki ruang serta peluang yang setara sesuai aturan.

Tahap ketiga adalah pembentukan alternatif melalui dialog dengan berbagai kalangan dan organisasi yang memiliki keahlian atau kepentingan pada pemilu. Pertimbangan eksternal membantu Pansus menguji dampak pilihan kebijakan dan memperluas konteks pengambilan keputusan. Alternatif kemudian dibandingkan berdasarkan tujuan, kriteria, dan konsekuensi pelaksanaannya.

Tahap keempat adalah penciptaan arus informasi yang bebas. Isu yang belum disepakati didiskusikan secara intensif untuk menyamakan pengertian, mengurangi salah tafsir, dan menemukan sisi kesamaan. Dalam perspektif fungsional, pertukaran informasi membantu kelompok mengenali kelemahan argumen serta memperbaiki kualitas keputusan.

4.3. Dialog dan Pengelolaan Perbedaan

Lima isu krusial berkaitan langsung dengan kepentingan elektoral fraksi sehingga wajar jika pembahasannya mengalami kebuntuan. Perspektif dialektika menjelaskan bahwa dialog tidak menghilangkan ketegangan, tetapi menyediakan ruang untuk mengelola suara yang bertentangan. Kesepakatan dibangun dengan menempatkan tujuan kepemiluan yang sama sebagai dasar, kemudian merundingkan perbedaan pada tingkat instrumen kebijakan.

Strategi integratif terlihat pada upaya mengakomodasi kepentingan pemilih, calon, partai, dan penyelenggara. Namun, sumber tidak menyediakan rekaman proses per isu atau bukti rinci mengenai konsesi setiap fraksi. Karena itu, temuan ini terbatas pada pola strategi yang dinyatakan dalam naskah: kajian masalah, komunikasi aktif, lobi, dialog, pertukaran informasi, perbandingan alternatif, dan penekanan pada kesamaan kepentingan.

4.4. Implikasi bagi Perumusan Kebijakan

Negosiasi kebijakan memerlukan struktur yang menghubungkan informasi teknis dan kepentingan politik. Kajian yang kuat memberi dasar untuk menilai konsekuensi, sedangkan komunikasi antarfaksi memastikan bahwa perbedaan dapat dinyatakan secara terbuka. Lobi berfungsi membuka akses dan memperjelas posisi, tetapi keputusan akhir tetap perlu didasarkan pada tujuan pemilu yang adil, konsisten, dan dapat dilaksanakan.

Kualitas keputusan kelompok bergantung pada kemampuan peserta menjalankan fungsi komunikasi secara lengkap. Kelompok yang berhenti pada pertukaran posisi akan sulit menemukan alternatif. Sebaliknya, kelompok yang merumuskan masalah, menguji pilihan, dan mengaitkan keputusan dengan kriteria bersama memiliki peluang lebih besar mencapai kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kesimpulan

Strategi negosiasi dalam penyesuaian RUU Pemilu Tahun 2017 berlangsung melalui identifikasi masalah, pemetaan kebutuhan dan kepentingan fraksi, komunikasi intensif, lobi, dialog dengan pemangku kepentingan, pertukaran informasi, perbandingan alternatif, dan pencarian titik temu. Lima isu krusial menjadi sumber ketegangan karena masing-masing memiliki konsekuensi terhadap posisi aktor pemilu.

Teori dialektika hubungan menunjukkan bahwa perbedaan perlu dikelola melalui dialog, sedangkan pendekatan fungsional menekankan pentingnya tahapan pemecahan masalah dan kualitas komunikasi kelompok. Negosiasi yang berorientasi integratif lebih sesuai bagi perumusan kebijakan karena berusaha menjaga keadilan dan ruang yang setara bagi para aktor pemilu.

Penelitian berikutnya perlu melengkapi jumlah dan karakteristik informan, kronologi pembahasan per isu, kutipan perwakilan fraksi, serta bentuk konsesi yang menghasilkan keputusan. Kelengkapan tersebut diperlukan agar hubungan antara strategi komunikasi, perubahan posisi, dan hasil kebijakan dapat diuji secara lebih kuat.

Daftar Pustaka

- Baxter, Leslie A. dan Barbara M. Montgomery. 2013. *A Guide to Dialectical Approaches to Studying Personal Relationships*. Dalam Littlejohn dan Foss. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewey, John. 1910. *How We Think*. Boston: D.C. Heath. Dikutip dalam Littlejohn dan Foss, 2013.
- Jackman, Ann. 2005. *How to Negotiate: Teknik Sukses Bernegosiasi*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Partao, Zainal Abidin. 2006. *Teknik Lobi dan Diplomasi untuk Insan Public Relations*. Jakarta: Indeks Gramedia.
- Quinn. 2000. *Strategi Pemasaran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Scott, Bill. 1990. *Strategi dan Teknik Negosiasi*. Jakarta: PPM.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarmudji, Tarsis. 1993. *Kiat Melobi: Suatu Pendekatan Nonformal*. Yogyakarta: Liberty.
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

